



SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 7 Tahun 2022.

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya penyetaraan jabatan pengawas kedalam jabatan fungsional tertentu, maka berdampak terhadap tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, belum mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat, dan Kabupaten Dati II Deli

Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 40);

18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
6. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang diberikan berdasarkan beban kerja, dan kelangkaan profesi.
8. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.
12. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Pemerintah Daerah.
13. Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
14. TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

15. TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus, atau TPP yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
17. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
18. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Struktural Eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
19. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
20. Daftar hadir adalah rekam kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan jam pulang kerja baik secara manual maupun elektronik dengan menggunakan mesin presensi elektronik dan/atau aplikasi presensi mobile.
21. Mesin presensi elektronik adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk rekam kehadiran PNS dengan cara deteksi sidik jari dan/atau pemindai retina mata.
22. Aplikasi presensi mobile adalah perangkat lunak yang digunakan untuk rekam kehadiran PNS melalui Smartphone/Android yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian PNS.
23. Aplikasi E-Kinerja adalah aplikasi berbasis Web yang digunakan untuk melaksanakan prosedur pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data produktivitas kerja PNS.
24. Cuti adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

25. Izin adalah kondisi Pegawai tidak masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktu, karena alasan keperluan pribadi atau keluarga yang bersifat mendadak dan tidak terduga berdasarkan persetujuan atasan langsung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah dan tidak melakukan rekam kehadiran menggunakan mesin presensi elektronik atau aplikasi presensi mobile.
27. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
28. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan masuk bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.
29. Pulang Sebelum waktu adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.
30. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai yang dibuat setiap bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
31. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
32. Tunjangan khusus adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
33. Pejabat Pengelola Kepegawaian adalah pejabat struktural atau pejabat fungsional yang tugas pokok dan fungsi jabatannya melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
34. Pengelola Data TPP adalah pegawai yang diberi tugas menghimpun, menyusun, dan membuat rekapitulasi data disiplin kerja dan data

produktivitas kerja sebagai bahan TPP, serta mengelola aplikasi kehadiran dan aplikasi E-Kinerja pada Perangkat Daerah.

35. Pengelola TPP adalah pegawai yang diberi tugas menghimpun dan menyusun rekapitulasi perhitungan akhir perolehan TPP untuk diajukan ke Perangkat daerah yang menangani urusan pengelola keuangan daerah.
36. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
37. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
38. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja, disiplin yang tinggi, serta rasa tanggung jawab dalam mengabdikan diri kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pemberian TPP bertujuan :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Meningkatkan kinerja PNS dan Calon PNS;
 - c. Meningkatkan disiplin PNS dan Calon PNS;
 - d. Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan Calon PNS;
 - e. Meningkatkan integritas PNS dan Calon PNS.

BAB III
KRITERIA TPP
Pasal 3

Kriteria TPP diberikan berdasarkan :

- a. Beban kerja;
- b. Kelangkaan Profesi.

Pasal 4

Besaran TPP berdasarkan beban kerja, dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dialokasikan untuk setiap kelas jabatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBERIAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP
Bagian Kesatu
Pemberian TPP
Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Daerah.
- (2) TPP diberikan kepada PNS pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain ke Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah bertugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan pada Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Calon PNS formasi jabatan pelaksana diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya, terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) Calon PNS formasi jabatan fungsional diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatan fungsionalnya, terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

- (5) TPP diberikan kepada PNS yang sedang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan penting dengan ketentuan melampirkan surat izin cuti.
- (6) Pegawai dan/atau pejabat yang merangkap sebagai Plt. diberikan TPP tambahan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pegawai dan/atau pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap, yang merangkap sebagai Plt. hanya menerima TPP pada Jabatan dengan TPP tertinggi.
 - d. TPP tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang merangkap sebagai Plt. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.

Pasal 6

TPP tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang diberhentikan sementara;
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan;
- d. PNS yang sedang dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
- e. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- f. PNS yang sedang menjalani cuti besar, kecuali untuk kepentingan agama;
- g. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat;
- h. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
- i. PNS dengan jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah yang mendapat tunjangan profesi dari sumber dana APBN.

P

Bagian Kedua
Penundaan Pembayaran TPP
Pasal 7

Sanksi penundaan pembayaran TPP diberikan kepada :

- a. PNS yang masih menguasai dan belum mengembalikan aset milik pemerintah daerah, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang bukan merupakan hak dan kewenangannya.
- b. PNS yang wajib lapor namun belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai batas waktu yang ditentukan.
- c. Pegawai yang belum melaksanakan kewajiban melunasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

BAB V
INSTRUMEN PERHITUNGAN TPP
Pasal 8

- (1) Besaran TPP yang diterima setiap PNS dihitung berdasarkan :
 - a. Penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan; dan
 - b. Penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan.
- (2) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai setiap bulan melalui Aplikasi E-Kinerja.
- (3) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja yang direkam menggunakan mesin presensi elektronik atau aplikasi presensi mobile.

BAB VI
PENGURANGAN DAN PERHITUNGAN TPP
Bagian Kesatu
Pengurangan TPP
Pasal 9

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 3% (tiga persen) untuk 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan, dari besaran TPP yang ditetapkan;
 - b. Sebesar 100% (seratus persen) untuk 5 (lima) hari kerja atau lebih tidak masuk kerja tanpa keterangan secara kumulatif, dari besaran TPP yang ditetapkan.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP dari besaran TPP yang ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktu pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP dari besaran TPP yang ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit atau cuti melahirkan selama 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen), dan hanya diberikan TPP dari Penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) mulai bulan ke 2 (dua) pelaksanaan cuti.
- (5) Pegawai yang mengikuti tugas belajar berdasarkan surat perintah tugas, hanya diberikan TPP dari Penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Pegawai yang tidak mengikuti apel gabungan pada hari Senin, upacara hari Kesadaran Nasional, dan upacara hari besar nasional pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari Penilaian Disiplin Kerja, kecuali dengan alasan yang sah yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Bagian Kedua
Perhitungan TPP
Pasal 10

Rumus Perhitungan besar TPP yang diterima setiap bulan oleh PNS dan Calon PNS adalah sebagai berikut :

$$\{ (\text{Persentase produktivitas kerja} \times \text{Besaran TPP}) + (\text{Persentase disiplin kerja} \times \text{Besaran TPP}) \} \times (100\% - \text{persentase pengurangan TPP})$$

BAB VII
HARI DAN JAM KERJA
Pasal 11

- (1) Jumlah jam kerja formal pegawai yaitu 37 jam 30 menit per minggu.
- (2) Ketentuan waktu kerja sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 12.30.
 - b. Hari Jum'at waktu kerja dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00, dengan waktu istirahat pukul 12.30 sampai dengan pukul 13.00.
- (3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan suci Ramadhan, yang penetapan waktunya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan waktu kerja dan waktu pengisian daftar hadir elektronik bagi perangkat daerah pelayanan publik yang menerapkan shift atau penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan ketentuan jam kerja formal tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit seminggu.

BAB VIII
PENGINPUTAN BAHAN TPP
Bagian Kesatu
Data Disiplin Kerja
Pasal 12

- (1) Setiap pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin presensi elektronik atau aplikasi presensi mobile pada saat masuk dan pulang kerja.
- (2) Radius penggunaan aplikasi presensi mobile untuk rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejauh 150 (seratus lima puluh) meter dari titik mesin presensi elektronik pada setiap unit kerja.
- (3) Perekaman atau pengisian daftar hadir secara tertulis/manual dilakukan apabila:
 - a. Mesin presensi elektronik dan aplikasi presensi mobile mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem perekaman kehadiran elektronik;
 - c. Unit kerja belum memiliki mesin presensi elektronik dan/atau aplikasi presensi mobile
- (4) Apabila mesin presensi elektronik dan/atau aplikasi presensi mobile mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Kepala Perangkat Daerah membuat berita acara kerusakan perangkat dan melampirkan daftar hadir secara tertulis/manual dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan seperti melakukan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mengikuti sosialisasi, mengikuti diklat kedinasan dan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (work from home), dianggap hadir walaupun tidak melakukan rekam kehadiran dengan ketentuan melampirkan Surat Perintah Tugas dan Laporan Hasil Penugasan.

- (2) Surat Perintah Tugas dan Laporan Hasil Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada atasan langsung paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Pegawai yang melaksanakan cuti melakukan rekam kehadiran dengan melampirkan Surat Izin Cuti.

Pasal 14

- (1) Izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, bersifat mendadak, dan tidak terduga untuk paling lama 2 (dua) hari kerja, dapat terlebih dahulu dilakukan dengan mengajukan permohonan/pemberitahuan secara lisan melalui pesan media elektronik (telepon, whatsapp, sms, atau sejenisnya) kepada atasan langsung, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Izin Tidak Masuk Kerja oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Berita Acara izin tidak masuk kerja yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Format Berita Acara Izin Tidak Masuk Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Izin pulang sebelum waktu dengan alasan yang sah, bersifat mendadak dan tidak terduga dapat terlebih dahulu dilakukan dengan mengajukan permohonan/pemberitahuan secara lisan melalui pesan media elektronik (telepon, whatsapp, sms, atau sejenisnya) kepada atasan langsung, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Izin Pulang Sebelum Waktu oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian.
- (2) Format Berita Acara Izin Pulang Sebelum Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Data Produktivitas Kerja
Pasal 16

- (1) Setiap pegawai wajib membuat laporan kinerja setiap bulan melalui aplikasi E-Kinerja.
- (2) Laporan Kinerja bulanan dibuat secara manual, jika Sistem Aplikasi E-Kinerja mengalami kerusakan lebih dari 1 (satu) bulan kalender, dengan format sesuai Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), divalidasi oleh pejabat penilai selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya untuk dilakukan penilaian dan bersifat final.
- (4) Jika pejabat penilai tidak dapat melakukan penilaian laporan kinerja pegawai dengan alasan tertentu, maka penilaian diserahkan kepada atasan pejabat penilai.
- (5) Ketentuan terkait Penilaian Kinerja PNS mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENGELOLA DATA TPP
Pasal 17

- (1) Pengelola data TPP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pegawai yang melaksanakan urusan kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Data TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Produktivitas Kerja dan data Disiplin Kerja.
- (3) Pengelola TPP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pegawai yang melaksanakan urusan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah.

- (4) Pengelola data TPP pada Perangkat Daerah mempunyai tugas:
- mengelola Aplikasi E-Kinerja dan Aplikasi Kehadiran pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis surat cuti, berita acara izin tidak masuk kerja, berita acara pulang sebelum waktu, dan surat perintah tugas sebagai bahan perhitungan penilaian disiplin kerja;
 - menghimpun laporan kinerja pegawai sebagai bahan perhitungan penilaian produktivitas kerja.
 - mengkonfirmasi pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran dan tidak menyerahkan laporan kinerja bulanan;
 - menyusun rekapitulasi Disiplin Kerja.
 - menyusun rekapitulasi Produktivitas Kerja.
- (5) Pengelola TPP mempunyai tugas:
- menghimpun hasil persentase Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja dari pengelola data TPP.
 - menyusun rekapitulasi perhitungan akhir perolehan TPP bulanan untuk disahkan Kepala Perangkat Daerah.
 - mengajukan SPM TPP ke Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan daerah.
 - Membayarkan TPP kepada pegawai.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 18

- TPP dibayarkan secara bulanan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Permintaan Pembayaran uang TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh), kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan.

- (4) Apabila terdapat kelebihan pembayaran TPP pada bulan Desember maka dilakukan pemotongan pembayaran uang TPP untuk bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal TPP tidak dapat dibayarkan dalam bulan berjalan karena kendala teknis atau kondisi tertentu, maka pembayaran TPP dilakukan secara rapel.
- (6) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pejabat penanggungjawab mengajukan SPP-LS melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Perangkat Daerah.
 - b. SPP-LS dilampiri dengan dokumen :
 1. Rekapitulasi Perhitungan TPP atas dasar Disiplin Kerja, dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
 2. Rekapitulasi Perhitungan TPP atas dasar Produktivitas Kerja, dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini;
 3. Daftar perhitungan akhir TPP atas dasar Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja yang telah disahkan Pejabat Penanggungjawab dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kehadiran pegawainya, dan keamanan mesin presensi elektronik pada unit kerjanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Penilai secara berjenjang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing PNS dan Calon PNS.

- (3) Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi data disiplin kerja dan kebenaran rekapitulasi data produktivitas kerja.
- (4) Untuk kepentingan pengawasan terhadap kehadiran PNS yang dinilai tidak disiplin melaksanakan ketentuan waktu kerja, Kepala Perangkat Daerah mempunyai kewenangan untuk menonaktifkan akses aplikasi presensi mobile PNS dengan mengajukan surat permintaan penonaktifan akses presensi mobile ke Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Badan Kepegawaian Daerah memiliki kewenangan untuk menggunakan data kehadiran pegawai untuk kepentingan pembinaan disiplin pegawai.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian TPP dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pegawai yang bertugas pada Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diberikan insentif dan tunjangan khusus.

- (2) Insentif dan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Tunjangan Khusus Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Ketentuan dan Tata Cara pemberian insentif dan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Peraturan Bupati ini dilaksanakan untuk pembayaran TPP mulai bulan Januari 2022.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 11);
2. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 13);
3. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 33);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 14-4-2022.

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 14-2-2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I

NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran I Peraturan Bupati Langkat

Nomor : 7 Tahun 2022

Tanggal : 14-4-2022

Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	2	3	4	5	6
	SEKRETARIAT DAERAH				
1	SEKRETARIS DAERAH	Sekretariat Daerah	Struktural	15	51.095.320
2	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah	Fungsional	13	17.208.262
3	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Sekretariat Daerah	Fungsional	13	17.208.262
4	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Sosial dan Kemasyarakatan	Sekretariat Daerah	Fungsional	13	17.208.262
	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	Struktural	14	25.308.394
	BAGIAN PEMERINTAHAN				
1	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Struktural	12	11.342.766
2	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	4.692.407
3	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	2.812.582
4	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	1.901.816
5	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	5	1.741.053
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Struktural	12	11.342.766
2	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	4.692.407
3	JF Penyuluh Sosial	Sekretariat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	4.692.407
4	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	2.812.582
5	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	1.901.816
6	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	5	1.741.053
	BAGIAN HUKUM				
1	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	Struktural	12	12.120.152
2	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	5.155.446
3	JF Analis Hukum Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	4.948.732
4	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	2.877.037
5	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	1.901.816
6	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	5	1.741.053
	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	Struktural	14	25.308.394
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				
1	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah	Struktural	12	11.342.766
2	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	4.692.407

3	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	2.812.582
4	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	1.901.816
5	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	5	1.741.053
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
1	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Struktural	12	11.342.766
2	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	4.692.407
3	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	2.812.582
4	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	1.901.816
5	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	5	1.741.053
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Struktural	12	14.028.281
2	JF Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	Sekretariat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	12.502.060
3	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	11.001.298
4	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	4.002.216
5	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	5	3.500.153
	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Sekretariat Daerah	Struktural	14	25.308.394
	BAGIAN UMUM				
1	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Daerah	Struktural	12	11.342.766
2	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	4.692.407
3	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	4.692.407
4	JF Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	4.692.407
5	Ajudan	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	3.106.046
6	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	2.812.582
7	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	1.901.816
8	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	5	1.741.053
9	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	3	1.528.438
10	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	1	1.482.864
	BAGIAN ORGANISASI				
1	Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	Struktural	12	12.120.152
2	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	4.948.732
3	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	2.877.037
4	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	1.901.816
5	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	5	1.741.053
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				

1	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Struktural	12	11.342.766
2	Kepala Sub Bagian Protokol	Sekretariat Daerah	Struktural	9	4.692.407
3	Kepala Sub Bagian Protokol	Sekretariat Daerah	Struktural	8	4.422.757
4	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	2.812.582
5	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	1.901.816
6	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	5	1.741.053
7	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	4.692.407
8	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	7	2.812.582
9	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	6	1.901.816
10	Jabatan Pelaksana	Sekretariat Daerah	Pelaksana	5	1.741.053
SEKRETARIAT DPRD					
1	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Struktural	14	17.824.199
2	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat DPRD	Struktural	12	7.738.523
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Sekretariat DPRD	Struktural	9	3.844.879
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Sekretariat DPRD	Struktural	8	3.273.040
5	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	5	1.715.574
8	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	3	1.518.041
9	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	1	1.476.062
10	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Sekretariat DPRD	Fungsional Penyetaraan	9	3.844.879
11	JF Penilai Pemerintah Ahli Muda	Sekretariat DPRD	Fungsional Penyetaraan	9	3.844.879
12	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	7	2.129.945
13	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	6	1.771.974
14	Ajudan	Sekretariat DPRD	Pelaksana	6	3.106.046
15	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
16	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Struktural	12	7.738.523
17	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Sekretariat DPRD	Fungsional Penyetaraan	9	4.051.593
18	JF Perisalah Legislatif Ahli Muda	Sekretariat DPRD	Fungsional Penyetaraan	9	3.844.879
19	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Sekretariat DPRD	Fungsional Penyetaraan	9	3.844.879
20	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	7	2.129.945
21	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	6	1.771.974
22	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
23	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	3	1.518.041
24	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	1	1.476.062
25	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Sekretariat DPRD	Struktural	12	7.738.523
26	JF Analis Anggaran Ahli Muda	Sekretariat DPRD	Fungsional Penyetaraan	9	3.844.879
27	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	Sekretariat DPRD	Fungsional Penyetaraan	9	3.844.879
28	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat DPRD	Fungsional Penyetaraan	9	3.844.879
29	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	7	2.129.945
30	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	6	1.771.974
31	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574

32	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	3	1.518.041
33	Jabatan Pelaksana	Sekretariat DPRD	Pelaksana	1	1.476.062
INSPEKTORAT DAERAH					
1	Inspektur	Inspektorat Daerah	Struktural	14	36.239.256
2	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat Daerah	Struktural	12	11.236.759
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Inspektorat Daerah	Struktural	9	4.630.392
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Inspektorat Daerah	Struktural	8	4.246.644
5	Jabatan Pelaksana	Inspektorat Daerah	Pelaksana	7	2.666.093
6	Jabatan Pelaksana	Inspektorat Daerah	Pelaksana	6	1.847.079
7	Jabatan Pelaksana	Inspektorat Daerah	Pelaksana	5	1.741.053
8	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Inspektorat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	4.630.392
9	JF Perencana Ahli Muda	Inspektorat Daerah	Fungsional Penyetaraan	9	4.630.392
10	Jabatan Pelaksana	Inspektorat Daerah	Pelaksana	7	2.666.093
11	Jabatan Pelaksana	Inspektorat Daerah	Pelaksana	6	1.847.079
12	Jabatan Pelaksana	Inspektorat Daerah	Pelaksana	5	1.741.053
13	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	Inspektorat Daerah	Struktural	11	11.228.080
14	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	Inspektorat Daerah	Struktural	11	11.228.080
15	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	Inspektorat Daerah	Struktural	11	11.228.080
16	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	Inspektorat Daerah	Struktural	11	11.228.080
17	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH V	Inspektorat Daerah	Struktural	11	11.228.080
18	JF Auditor Madya	Inspektorat Daerah	Fungsional	11	8.108.258
19	JF Auditor Muda	Inspektorat Daerah	Fungsional	9	5.622.619
20	JF Auditor Pertama	Inspektorat Daerah	Fungsional	8	4.107.083
21	JF Auditor Penyelia	Inspektorat Daerah	Fungsional	8	4.107.083
22	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	Inspektorat Daerah	Fungsional	11	8.108.258
23	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	Inspektorat Daerah	Fungsional	9	5.622.619
24	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	Inspektorat Daerah	Fungsional	8	4.107.083
DINAS PENDIDIKAN					
1	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pendidikan	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Pendidikan	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
8	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	3	1.518.041
9	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	1	1.476.062
10	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423

11	JF Perencana Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
12	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	7	2.129.945
13	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
14	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
15	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Dinas Pendidikan	Struktural	11	6.430.876
16	JF Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
17	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	7	2.129.945
18	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
19	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
20	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Dinas Pendidikan	Struktural	9	3.307.423
21	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Dinas Pendidikan	Struktural	8	3.223.197
22	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	7	2.129.945
23	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
24	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
25	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	3	1.518.041
26	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	1	1.476.062
27	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Dinas Pendidikan	Struktural	9	3.307.423
28	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Dinas Pendidikan	Struktural	8	3.223.197
29	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	7	2.129.945
30	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
31	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
32	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	3	1.518.041
33	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	1	1.476.062
34	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	Struktural	11	6.430.876
35	JF Pengembang Kurikulum Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
36	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	7	2.129.945
37	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
38	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
39	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	Dinas Pendidikan	Struktural	9	3.307.423
40	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	Dinas Pendidikan	Struktural	8	3.223.197
41	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	7	2.129.945
42	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
43	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
44	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	3	1.518.041
45	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	1	1.476.062
46	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Dinas Pendidikan	Struktural	9	3.307.423
47	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP	Dinas Pendidikan	Struktural	8	3.223.197
48	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	7	2.129.945
49	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
50	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
51	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	3	1.518.041
52	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	1	1.476.062
53	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	Struktural	11	6.430.876
54	JF Pengembang Kurikulum Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
55	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	7	2.129.945
56	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
57	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
58	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD	Dinas Pendidikan	Struktural	9	3.307.423
59	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD	Dinas Pendidikan	Struktural	8	3.223.197
60	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	7	2.129.945

61	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
62	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
63	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	3	1.518.041
64	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	1	1.476.062
65	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	Dinas Pendidikan	Struktural	9	3.307.423
66	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	Dinas Pendidikan	Struktural	8	3.223.197
67	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	7	2.129.945
68	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
69	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
70	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	3	1.518.041
71	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	1	1.476.062
72	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan	Struktural	11	6.430.876
73	JF Pengembang Kurikulum Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
74	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	7	2.129.945
75	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
76	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
77	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Struktural	9	3.307.423
78	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Struktural	8	3.223.197
79	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	7	2.129.945
80	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
81	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
82	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	3	1.518.041
83	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	1	1.476.062
84	Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan	Dinas Pendidikan	Struktural	9	3.307.423
85	Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan	Dinas Pendidikan	Struktural	8	3.223.197
86	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	7	2.129.945
87	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
88	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
89	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	3	1.518.041
90	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	1	1.476.062
UPT SATUAN PENDIDIKAN					
1	JF Guru Utama	UPT Satuan Pendidikan	Fungsional	13	0
2	JF Guru Madya	UPT Satuan Pendidikan	Fungsional	11	0
3	JF Guru Muda	UPT Satuan Pendidikan	Fungsional	9	0
4	JF Guru Pertama	UPT Satuan Pendidikan	Fungsional	8	0
5	Jabatan Pelaksana	UPT Satuan Pendidikan	Pelaksana	6	1.771.974
6	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	5	1.715.574
7	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	3	1.518.041
8	Jabatan Pelaksana	Dinas Pendidikan	Pelaksana	1	1.476.062
9	JF Penilik Madya	UPT Satuan Pendidikan	Fungsional	11	3.136.213
10	JF Penilik Muda	UPT Satuan Pendidikan	Fungsional	9	2.563.253
11	JF Penilik Pertama	UPT Satuan Pendidikan	Fungsional	8	2.226.332
12	JF Pamong Belajar Madya	UPT Satuan Pendidikan	Fungsional	11	3.136.213
DINAS KESEHATAN					
1	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Struktural	14	17.824.199
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan	Struktural	12	7.738.523
3	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Informasi	Dinas Kesehatan	Struktural	9	3.849.014
4	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Informasi	Dinas Kesehatan	Struktural	8	3.273.040

5	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	6	1.774.519
7	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	5	1.719.820
8	JF Administrator Kesehatan Madya	Dinas Kesehatan	Fungsional	11	3.136.213
9	JF Administrator Kesehatan Muda	Dinas Kesehatan	Fungsional	9	2.563.253
10	JF Administrator Kesehatan Pertama	Dinas Kesehatan	Fungsional	8	2.226.332
11	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	Dinas Kesehatan	Struktural	9	3.849.014
12	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	Dinas Kesehatan	Struktural	8	3.273.040
13	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	7	2.129.945
14	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	6	1.774.519
15	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	5	1.719.820
16	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Struktural	11	6.654.891
17	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Fungsional Penyetaraan	9	3.849.014
18	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	7	2.129.945
19	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	6	1.774.519
20	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	5	1.719.820
21	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	Dinas Kesehatan	Fungsional	8	2.226.332
22	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	Dinas Kesehatan	Fungsional	8	2.226.332
23	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Dinas Kesehatan	Fungsional	9	2.563.253
24	Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Masyarakat	Dinas Kesehatan	Struktural	11	6.654.891
25	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Fungsional Penyetaraan	9	3.849.014
26	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	7	2.129.945
27	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	6	1.774.519
28	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	5	1.719.820
29	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	Dinas Kesehatan	Fungsional	11	3.136.213
30	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Dinas Kesehatan	Fungsional	9	2.563.253
31	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Struktural	11	6.654.891
32	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Fungsional Penyetaraan	9	3.849.014
33	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	Dinas Kesehatan	Fungsional	11	3.136.213
34	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Dinas Kesehatan	Fungsional	9	2.563.253
35	JF Sanitarian Muda	Dinas Kesehatan	Fungsional	9	2.563.253
36	JF Administrator Kesehatan Pertama	Dinas Kesehatan	Fungsional	8	2.226.332
37	JF Sanitarian Penyelia	Dinas Kesehatan	Fungsional	8	2.226.332
38	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	7	2.129.945
39	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	6	1.774.519
40	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	5	1.719.820
41	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan	Struktural	11	6.654.891
42	JF Administrator Kesehatan Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Fungsional Penyetaraan	9	3.849.014
43	JF Apoteker Madya	Dinas Kesehatan	Fungsional	11	3.196.315
44	JF Apoteker Muda	Dinas Kesehatan	Fungsional	9	2.563.253
45	JF Apoteker Pertama	Dinas Kesehatan	Fungsional	8	2.226.332
46	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Dinas Kesehatan	Fungsional	9	2.563.253
47	JF Administrator Kesehatan Pertama	Dinas Kesehatan	Fungsional	8	2.226.332
48	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Dinas Kesehatan	Fungsional	7	2.138.734
49	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	Dinas Kesehatan	Fungsional	9	2.563.253
50	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	Dinas Kesehatan	Fungsional	8	2.226.332
51	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Dinas Kesehatan	Fungsional	6	1.794.887
52	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	7	2.129.945
53	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	6	1.774.519

54	Jabatan Pelaksana	Dinas Kesehatan	Pelaksana	5	1.719.820
	UPT INSTALASI FARMASI				
1	Kepala UPT Instalasi Farmasi	UPT Instalasi Farmasi	Struktural	9	3.472.794
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	UPT Instalasi Farmasi	Struktural	8	2.751.347
3	Jabatan Pelaksana	UPT Instalasi Farmasi	Pelaksana	7	2.129.945
4	Jabatan Pelaksana	UPT Instalasi Farmasi	Pelaksana	6	1.771.974
5	Jabatan Pelaksana	UPT Instalasi Farmasi	Pelaksana	5	1.715.574
	UPT LABORATORIUM KESEHATAN				
1	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan	UPT Labkes	Struktural	9	3.472.794
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	UPT Labkes	Struktural	8	2.751.347
3	Jabatan Pelaksana	UPT Labkes	Pelaksana	7	2.129.945
4	Jabatan Pelaksana	UPT Labkes	Pelaksana	6	1.771.974
5	Jabatan Pelaksana	UPT Labkes	Pelaksana	5	1.715.574
	UPT PUSKESMAS				
1	Kepala UPT Puskesmas	UPT. Puskesmas	Struktural	9	3.431.452
2	Jabatan Pelaksana	UPT. Puskesmas	Pelaksana	1	1.476.062
3	Jabatan Pelaksana	UPT. Puskesmas	Pelaksana	3	1.518.041
4	Jabatan Pelaksana	UPT. Puskesmas	Pelaksana	5	1.715.574
5	Jabatan Pelaksana	UPT. Puskesmas	Pelaksana	6	1.771.974
6	Jabatan Pelaksana	UPT. Puskesmas	Pelaksana	7	2.129.945
7	JF Sanitarian Terampil	UPT. Puskesmas	Fungsional	6	1.794.887
8	JF Perawat Terampil	UPT. Puskesmas	Fungsional	6	1.794.887
9	JF Perawat Gigi Terampil	UPT. Puskesmas	Fungsional	6	1.794.887
10	JF Bidan Terampil	UPT. Puskesmas	Fungsional	6	1.794.887
11	JF Nutrisi Terampil	UPT. Puskesmas	Fungsional	6	1.794.887
12	JF Bidan Pelaksana	UPT. Puskesmas	Fungsional	6	1.794.887
13	JF Asisten Apoteker Pelaksana	UPT. Puskesmas	Fungsional	6	1.794.887
14	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	UPT. Puskesmas	Fungsional	6	1.794.887
15	JF Perawat Gigi Pelaksana	UPT. Puskesmas	Fungsional	6	1.794.887
16	JF Perawat Pelaksana	UPT. Puskesmas	Fungsional	6	1.794.887
17	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	UPT. Puskesmas	Fungsional	6	1.794.887
18	JF Sanitarian Pelaksana	UPT. Puskesmas	Fungsional	6	1.794.887
19	JF Asisten Apoteker terampil	UPT. Puskesmas	Fungsional	6	1.794.887
20	JF Nutrisi Pelaksana	UPT. Puskesmas	Fungsional	6	1.794.887
21	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	UPT. Puskesmas	Fungsional	7	2.138.734
22	JF Perawat Mahir	UPT. Puskesmas	Fungsional	7	2.138.734
23	JF Bidan Mahir	UPT. Puskesmas	Fungsional	7	2.138.734
24	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	UPT. Puskesmas	Fungsional	7	2.138.734
25	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	UPT. Puskesmas	Fungsional	7	2.138.734
26	JF Nutrisi Mahir	UPT. Puskesmas	Fungsional	7	2.138.734
27	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	UPT. Puskesmas	Fungsional	7	2.138.734
28	JF Nutrisi Pelaksana Lanjutan	UPT. Puskesmas	Fungsional	7	2.138.734
29	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	UPT. Puskesmas	Fungsional	7	2.138.734
30	JF Perawat Gigi Mahir	UPT. Puskesmas	Fungsional	7	2.138.734
31	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	UPT. Puskesmas	Fungsional	7	2.138.734
32	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	UPT. Puskesmas	Fungsional	7	2.138.734
33	JF Bidan Mahir Lanjutan	UPT. Puskesmas	Fungsional	7	2.138.734
34	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
35	JF Perawat Penyelia	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
36	JF Bidan Penyelia	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
37	JF Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
38	JF Asisten Apoteker Penyelia	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
39	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332

40	JF Perawat Pertama	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
41	JF Bidan Pertama	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
42	JF Nutrisionis Penyelia	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
43	JF Sanitarian Penyelia	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
44	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
45	JF Perawat Gigi Penyelia	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
46	JF Nutrisionis Pertama	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
47	JF Dokter Gigi Pelaksana Lanjutan	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.312.727
48	JF Sanitarian Pertama	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
49	JF Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
50	JF Asisten Apoteker Pertama	UPT. Puskesmas	Fungsional	8	2.226.332
51	JF Dokter Pertama	UPT. Puskesmas	Fungsional	9	2.645.939
52	JF Dokter Gigi Pertama	UPT. Puskesmas	Fungsional	9	2.645.939
53	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	UPT. Puskesmas	Fungsional	9	2.563.253
54	JF Perawat Muda	UPT. Puskesmas	Fungsional	9	2.563.253
55	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	UPT. Puskesmas	Fungsional	9	2.563.253
56	JF Apoteker Muda	UPT. Puskesmas	Fungsional	9	2.563.253
57	JF Bidan Muda	UPT. Puskesmas	Fungsional	9	2.563.253
58	JF Dokter Muda	UPT. Puskesmas	Fungsional	10	3.635.780
59	JF Dokter Gigi Muda	UPT. Puskesmas	Fungsional	10	3.635.780
60	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	UPT. Puskesmas	Fungsional	11	3.136.213
61	JF Perawat Madya	UPT. Puskesmas	Fungsional	11	3.136.213
62	JF Bidan Madya	UPT. Puskesmas	Fungsional	11	3.136.213
63	JF Sanitarian Madya	UPT. Puskesmas	Fungsional	11	3.136.213
64	JF Dokter Madya	UPT. Puskesmas	Fungsional	12	4.049.474
65	JF Dokter Gigi Madya	UPT. Puskesmas	Fungsional	12	4.049.474
UPT Rumah Sakit Umum Tanjung Pura					
1	Direktur RSUD Tanjung Pura	UPT RSUD Tanjung Pura	Struktural	12	10.883.402
2	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Tanjung Pura	UPT RSUD Tanjung Pura	Struktural	11	6.638.500
3	Kepala Sub Bagian Umum	UPT RSUD Tanjung Pura	Struktural	8	3.223.197
4	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	7	2.129.945
5	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	6	1.771.974
6	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	5	1.715.574
7	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	4	1.598.159
8	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	1	1.476.062
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi	UPT RSUD Tanjung Pura	Struktural	8	3.223.197
10	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	7	2.129.945
11	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	6	1.771.974
12	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	5	1.715.574
13	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	UPT RSUD Tanjung Pura	Struktural	8	3.223.197
14	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	7	2.129.945
15	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	6	1.771.974
16	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	5	1.715.574
17	Kepala Bidang Pelayanan Medis	UPT RSUD Tanjung Pura	Struktural	11	6.638.500

18	Kepala Seksi Pelayanan Medis	UPT RSUD Tanjung Pura	Struktural	8	3.223.197
19	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	6	1.771.974
20	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	5	1.715.574
21	Kepala Seksi Pengendalian Instalasi	UPT RSUD Tanjung Pura	Struktural	8	3.223.197
22	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	6	1.771.974
23	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	5	1.715.574
24	Kepala Bidang Keperawatan	UPT RSUD Tanjung Pura	Struktural	11	6.638.500
25	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	UPT RSUD Tanjung Pura	Struktural	8	3.223.197
26	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	6	1.771.974
27	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	5	1.715.574
28	Kepala Seksi Etika, Mutu, dan Logistik Keperawatan	UPT RSUD Tanjung Pura	Struktural	8	3.223.197
29	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	6	1.771.974
30	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	5	1.715.574
31	Kepala Bidang Penunjang Medis	UPT RSUD Tanjung Pura	Struktural	11	6.638.500
32	Kepala Seksi Penunjang Medis	UPT RSUD Tanjung Pura	Struktural	8	3.223.197
33	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	6	1.771.974
34	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	5	1.715.574
35	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	UPT RSUD Tanjung Pura	Struktural	8	3.223.197
36	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	6	1.771.974
37	Jabatan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Pelaksana	5	1.715.574
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	JF Dokter Utama	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	14	5.120.764
2	JF Apoteker Utama	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	13	4.154.023
3	JF Dokter Madya	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	12	4.049.474
4	JF Dokter Gigi Madya	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	12	4.049.474
5	JF Fisikawan Medis Madya	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	11	3.136.213
6	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	11	3.136.213
7	JF Dokter Muda	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	10	3.635.780
8	JF Dokter Gigi Muda	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	10	3.635.780
9	JF Dokter Pertama	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	9	2.645.939
10	JF Apoteker Muda	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	9	2.563.253
11	JF Perawat Muda	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	9	2.563.253
12	JF Nutrisionis Muda	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	9	2.563.253
13	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	9	2.563.253

14	JF Asisten Apoteker Penyelia	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	8	2.226.332
15	JF Bidan Penyelia	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	8	2.226.332
16	JF Perawat Penyelia	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	8	2.226.332
17	JF Radiografer Penyelia	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	8	2.226.332
18	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	8	2.226.332
19	JF Sanitarian Penyelia	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	8	2.226.332
20	JF Fisioterapis Penyelia	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	8	2.226.332
21	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	7	2.138.734
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	7	2.138.734
23	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	7	2.138.734
24	JF Perawat Mahir	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	7	2.138.734
25	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	7	2.138.734
26	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	7	2.138.734
27	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	7	2.138.734
28	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	7	2.138.734
29	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	7	2.138.734
30	JF Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	7	2.138.734
31	JF Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	7	2.138.734
32	JF Bidan Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	6	1.794.887
33	JF Perawat Terampil	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	6	1.794.887
34	JF Perawat Gigi Pelaksana	UPT RSUD Tanjung Pura	Fungsional	6	1.794.887
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUPR	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas	Dinas PUPR	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Informasi Publik	Dinas PUPR	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Informasi Publik	Dinas PUPR	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	5	1.715.574
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas PUPR	Struktural	9	3.307.423
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas PUPR	Struktural	8	3.223.197
10	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	7	2.129.945
11	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	6	1.771.974
12	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	5	1.715.574
13	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Dinas PUPR	Struktural	11	6.430.876
14	JF Teknik Pengairan Ahli Muda	Dinas PUPR	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
15	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	7	2.129.945
16	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	6	1.771.974
17	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	5	1.715.574
18	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas PUPR	Struktural	11	6.430.876

19	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Dinas PUPR	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
20	JF Penata Ruang Ahli Muda	Dinas PUPR	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
21	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Dinas PUPR	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
22	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	7	2.129.945
23	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	6	1.771.974
24	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	5	1.715.574
25	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas PUPR	Struktural	11	6.430.876
26	JF Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Dinas PUPR	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
27	JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Dinas PUPR	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
28	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	7	2.129.945
29	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	6	1.771.974
30	Jabatan Pelaksana	Dinas PUPR	Pelaksana	5	1.715.574
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Kepala Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Dinas PERKIM	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas	Dinas PERKIM	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PERKIM	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PERKIM	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dinas PERKIM	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas PERKIM	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dinas PERKIM	Pelaksana	5	1.715.574
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas PERKIM	Struktural	9	3.307.423
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas PERKIM	Struktural	8	3.223.197
10	Jabatan Pelaksana	Dinas PERKIM	Pelaksana	7	2.129.945
11	Jabatan Pelaksana	Dinas PERKIM	Pelaksana	6	1.771.974
12	Jabatan Pelaksana	Dinas PERKIM	Pelaksana	5	1.715.574
13	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Dinas PERKIM	Struktural	11	6.430.876
14	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Dinas PERKIM	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
15	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Dinas PERKIM	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
16	Jabatan Pelaksana	Dinas PERKIM	Pelaksana	7	2.129.945
17	Jabatan Pelaksana	Dinas PERKIM	Pelaksana	6	1.771.974
18	Jabatan Pelaksana	Dinas PERKIM	Pelaksana	5	1.715.574
19	Kepala Bidang Pembangunan	Dinas PERKIM	Struktural	11	6.430.876
20	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Dinas PERKIM	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
21	Jabatan Pelaksana	Dinas PERKIM	Pelaksana	7	2.129.945
22	Jabatan Pelaksana	Dinas PERKIM	Pelaksana	6	1.771.974
23	Jabatan Pelaksana	Dinas PERKIM	Pelaksana	5	1.715.574
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	Struktural	14	17.824.199
2	Sekretaris	Satpol PP	Struktural	12	7.738.523
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Satpol PP	Struktural	9	3.849.014
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Satpol PP	Struktural	8	3.273.040
5	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	6	1.774.519
7	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	5	1.719.820
8	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	3	1.518.041
9	Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Asset	Satpol PP	Struktural	9	3.849.014
10	Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Asset	Satpol PP	Struktural	8	3.273.040
11	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	7	2.129.945
12	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	6	1.774.519
13	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	5	1.719.820

14	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan Peraturan Daerah	Satpol PP	Struktural	11	6.654.891
15	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Satpol PP	Struktural	9	3.849.014
16	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Satpol PP	Struktural	8	3.273.040
17	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	7	2.129.945
18	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	6	1.774.519
19	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	5	1.719.820
20	Kepala Seksi Penegak Peraturan	Satpol PP	Struktural	9	3.849.014
21	Kepala Seksi Penegak Peraturan	Satpol PP	Struktural	8	3.273.040
22	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	7	2.129.945
23	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	6	1.774.519
24	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	5	1.719.820
25	Kepala Bidang Penataan dan Penertiban	Satpol PP	Struktural	11	6.654.891
26	Kepala Seksi Penataan	Satpol PP	Struktural	9	3.849.014
27	Kepala Seksi Penataan	Satpol PP	Struktural	8	3.273.040
28	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	7	2.129.945
29	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	6	1.774.519
30	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	5	1.719.820
31	Kepala Seksi Operasi dan Penertiban	Satpol PP	Struktural	9	3.849.014
32	Kepala Seksi Operasi dan Penertiban	Satpol PP	Struktural	8	3.273.040
33	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	7	2.129.945
34	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	6	1.774.519
35	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	5	1.719.820
36	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Struktural	11	6.654.891
37	Kepala Seksi Pengamanan Sarana dan Prasarana	Satpol PP	Struktural	9	3.849.014
38	Kepala Seksi Pengamanan Sarana dan Prasarana	Satpol PP	Struktural	8	3.273.040
39	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	7	2.129.945
40	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	6	1.774.519
41	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	5	1.719.820
42	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Satpol PP	Struktural	9	3.849.014
43	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Satpol PP	Struktural	8	3.273.040
44	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	7	2.129.945
45	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	6	1.774.519
46	Jabatan Pelaksana	Satpol PP	Pelaksana	5	1.719.820
	DINAS SOSIAL				
1	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial	Struktural	14	17.824.199
2	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial	Struktural	12	7.738.523
3	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Informasi Data	Dinas Sosial	Struktural	9	3.849.014
4	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Informasi Data	Dinas Sosial	Struktural	8	3.273.040
5	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	6	1.774.519
7	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	5	1.719.820
8	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Dinas Sosial	Fungsional Penyetaraan	9	3.849.014
9	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	7	2.129.945
10	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	6	1.774.519
11	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	5	1.719.820
12	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Struktural	11	6.654.891
13	JF Pekerja Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	Fungsional Penyetaraan	9	3.849.014
14	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	7	2.129.945
15	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	6	1.774.519
16	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	5	1.719.820

17	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan dan Organisasi Sosial	Dinas Sosial	Struktural	11	6.654.891
18	JF Pekerja Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	Fungsional Penyetaraan	9	3.849.014
19	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	7	2.129.945
20	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	6	1.774.519
21	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	5	1.719.820
22	Kepala Bidang Pelayanan dan Penanganan Kemiskinan	Dinas Sosial	Struktural	11	6.654.891
23	JF Pekerja Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	Fungsional Penyetaraan	9	3.849.014
24	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	7	2.129.945
25	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	6	1.774.519
26	Jabatan Pelaksana	Dinas Sosial	Pelaksana	5	1.719.820
DINAS KOPERASI					
1	Kepala Dinas Koperasi	Dinas Koperasi	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas	Dinas Koperasi	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Koperasi	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Koperasi	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	5	1.715.574
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Koperasi	Struktural	9	3.307.423
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Koperasi	Struktural	8	3.223.197
10	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	7	2.129.945
11	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	6	1.771.974
12	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	5	1.715.574
13	Kepala Bidang Koperasi	Dinas Koperasi	Struktural	11	6.430.876
14	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Koperasi	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
15	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	7	2.129.945
16	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	6	1.771.974
17	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	5	1.715.574
18	Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi	Struktural	11	6.430.876
19	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Koperasi	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
20	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	7	2.129.945
21	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	6	1.771.974
22	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	5	1.715.574
23	Kepala Bidang Pengawasan Koperasi	Dinas Koperasi	Struktural	11	6.430.876
24	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda	Dinas Koperasi	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
25	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	7	2.129.945
26	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	6	1.771.974
27	Jabatan Pelaksana	Dinas Koperasi	Pelaksana	5	1.715.574
DINAS KETENAGAKERJAAN					
1	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas	Dinas Ketenagakerjaan	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Ketenagakerjaan	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Ketenagakerjaan	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	5	1.715.574
8	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Progam	Dinas Ketenagakerjaan	Struktural	9	3.307.423
9	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Progam	Dinas Ketenagakerjaan	Struktural	8	3.223.197

10	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	7	2.129.945
11	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	6	1.771.974
12	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	5	1.715.574
13	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Dinas Ketenagakerjaan	Struktural	11	6.430.876
14	JF Instruktur Ahli Muda	Dinas Ketenagakerjaan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
15	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	7	2.129.945
16	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	6	1.771.974
17	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	5	1.715.574
18	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Penempatan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Struktural	11	6.430.876
19	JF Pengantar Kerja Ahli Muda	Dinas Ketenagakerjaan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
20	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	7	2.129.945
21	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	6	1.771.974
22	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	5	1.715.574
23	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Struktural	11	6.430.876
24	JF Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Dinas Ketenagakerjaan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
25	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	7	2.129.945
26	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	6	1.771.974
27	Jabatan Pelaksana	Dinas Ketenagakerjaan	Pelaksana	5	1.715.574
28	JF Instruktur Madya	Dinas Ketenagakerjaan	Fungsional	11	3.136.213
29	JF Pengantar Kerja Madya	Dinas Ketenagakerjaan	Fungsional	11	3.136.213
30	JF Instruktur Penyelia	Dinas Ketenagakerjaan	Fungsional	8	2.226.332
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
1	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Distanpangan	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas	Distanpangan	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Distanpangan	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Distanpangan	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	5	1.715.574
8	JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Distanpangan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
9	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	7	2.129.945
10	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	6	1.771.974
11	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	5	1.715.574
12	Kepala Bidang Rehabilitasi / Pengembangan Lahan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	Distanpangan	Struktural	11	6.430.876
13	JF Analisis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda	Distanpangan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423

14	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda	Distanpangan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
15	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Distanpangan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
16	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	7	2.129.945
17	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	6	1.771.974
18	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	5	1.715.574
19	Kepala Bidang Produksi	Distanpangan	Struktural	11	6.430.876
20	JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Distanpangan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
21	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	Distanpangan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
22	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	7	2.129.945
23	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	6	1.771.974
24	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	5	1.715.574
25	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Agribisnis dan Penyuluhan	Distanpangan	Struktural	11	6.430.876
26	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Distanpangan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
27	JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Distanpangan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
28	JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Distanpangan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
29	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	7	2.129.945
30	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	6	1.771.974
31	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	5	1.715.574
32	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	Distanpangan	Fungsional	5	1.719.820
33	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana	Distanpangan	Fungsional	6	1.794.887
34	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	Distanpangan	Fungsional	7	2.138.734
35	JF Penyuluh Pertanian Pertama	Distanpangan	Fungsional	8	2.226.332
36	JF Penyuluh Pertanian Muda	Distanpangan	Fungsional	9	2.563.253
37	JF Penyuluh Pertanian Madya	Distanpangan	Fungsional	11	3.136.213
38	Kepala Bidang Peternakan	Distanpangan	Struktural	11	6.430.876
39	JF Medik Veteriner Ahli Muda	Distanpangan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
40	JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Distanpangan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
41	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	7	2.129.945
42	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	6	1.771.974
43	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	5	1.715.574
44	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	3	1.518.041
45	JF Pengawas Mutu Pakan Muda	Distanpangan	Fungsional	9	2.563.253
46	Kepala Bidang Perkebunan	Distanpangan	Struktural	11	6.430.876
47	JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Distanpangan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
48	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Distanpangan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
49	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	7	2.129.945
50	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	6	1.771.974
51	Jabatan Pelaksana	Distanpangan	Pelaksana	5	1.715.574
	UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian				
1	Kepala UPT BP3	UPT BP3	Struktural	9	3.472.794
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	UPT BP3	Struktural	8	2.751.347
3	Jabatan Pelaksana	UPT BP3	Pelaksana	7	2.129.945
4	Jabatan Pelaksana	UPT BP4	Pelaksana	6	1.771.974
5	Jabatan Pelaksana	UPT BP5	Pelaksana	5	1.715.574
	UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan				
1	Kepala UPT BPTP HP	UPT BPTP HP	Struktural	9	3.472.794
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	UPT BPTP HP	Struktural	8	2.751.347
3	Jabatan Pelaksana	UPT BPTP HP	Pelaksana	7	2.129.945
4	Jabatan Pelaksana	UPT BPTP HP	Pelaksana	6	1.771.974
5	Jabatan Pelaksana	UPT BPTP HP	Pelaksana	5	1.715.574

	UPT Pusat Kesehatan Hewan				
1	Kepala UPT Pukeswan	UPT Pukeswan	Struktural	9	3.472.794
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	UPT Pukeswan	Struktural	8	2.751.347
3	Jabatan Pelaksana	UPT Pukeswan	Pelaksana	7	2.129.945
4	Jabatan Pelaksana	UPT Pukeswan	Pelaksana	6	1.771.974
5	Jabatan Pelaksana	UPT Pukeswan	Pelaksana	5	1.715.574
6	Jabatan Pelaksana	UPT Pukeswan	Pelaksana	3	1.518.041
7	JF Medik Veteriner Madya	UPT Pukeswan	Fungsional	11	3.136.213
8	JF Paramedik Veteriner Mahir	UPT Pukeswan	Fungsional	7	2.138.734
9	JF Paramedik Veteriner Terampil	UPT Pukeswan Langkat Hilir	Fungsional	6	1.794.887
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	5	1.715.574
8	Kepala Sub Bagian Program	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural	9	3.307.423
9	Kepala Sub Bagian Program	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural	8	3.223.197
10	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	7	2.129.945
11	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	6	1.771.974
12	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	5	1.715.574
13	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Pplh	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural	11	6.430.876
14	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
15	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
16	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
17	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	7	2.129.945
18	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	6	1.771.974
19	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	5	1.715.574

20	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Padat B3 dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural	11	6.430.876
21	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
22	JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
23	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	7	2.129.945
24	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	6	1.771.974
25	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	5	1.715.574
26	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Struktural	11	6.430.876
27	JF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
28	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
29	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	7	2.129.945
30	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	6	1.771.974
31	Jabatan Pelaksana	Dinas Lingkungan Hidup	Pelaksana	5	1.715.574
	UPT Laboratorium Lingkungan				
1	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	UPT Lab. Lingkungan	Struktural	9	3.472.794
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	UPT Lab. Lingkungan	Struktural	8	2.751.347
3	Jabatan Pelaksana	UPT Lab. Lingkungan	Pelaksana	7	2.129.945
4	Jabatan Pelaksana	UPT Lab. Lingkungan	Pelaksana	6	1.771.974
5	Jabatan Pelaksana	UPT Lab. Lingkungan	Pelaksana	5	1.715.574
	UPT Persampahan				
1	Kepala UPT Persampahan	UPT Persampahan	Struktural	9	3.472.794
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	UPT Persampahan	Struktural	8	2.751.347
3	Jabatan Pelaksana	UPT Persampahan	Pelaksana	7	2.129.945
4	Jabatan Pelaksana	UPT Persampahan	Pelaksana	6	1.771.974
5	Jabatan Pelaksana	UPT Persampahan	Pelaksana	5	1.715.574
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK				
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak	Dinas PPKB PPA	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas	Dinas PPKB PPA	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PPKB PPA	Struktural	9	3.307.423

4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PPKB PPA	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	5	1.715.574
8	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Dinas PPKB PPA	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
9	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	7	2.129.945
10	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	6	1.771.974
11	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	5	1.715.574
12	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Dinas PPKB PPA	Struktural	11	6.430.876
13	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas PPKB PPA	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
14	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	7	2.129.945
15	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	6	1.771.974
16	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	5	1.715.574
17	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan	Dinas PPKB PPA	Struktural	11	6.430.876
18	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas PPKB PPA	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
19	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	7	2.129.945
20	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	6	1.771.974
21	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	5	1.715.574
22	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PPKB PPA	Struktural	11	6.430.876
23	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas PPKB PPA	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
24	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	Dinas PPKB PPA	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
25	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	7	2.129.945
26	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	6	1.771.974
27	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	5	1.715.574
28	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PPKB PPA	Struktural	11	6.430.876
29	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas PPKB PPA	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
30	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	7	2.129.945
31	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	6	1.771.974
32	Jabatan Pelaksana	Dinas PPKB PPA	Pelaksana	5	1.715.574
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Catpil	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Catpil	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Catpil	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Catpil	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	5	1.715.574
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Catpil	Struktural	9	3.307.423
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Catpil	Struktural	8	3.223.197
10	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	7	2.129.945
11	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	6	1.771.974
12	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	5	1.715.574
13	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Catpil	Struktural	11	6.430.876
14	JF Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Catpil	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
15	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	7	2.129.945
16	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	6	1.771.974

17	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	5	1.715.574
18	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Catpil	Struktural	11	6.430.876
19	JF Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Catpil	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
20	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	7	2.129.945
21	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	6	1.771.974
22	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	5	1.715.574
23	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Catpil	Struktural	11	6.430.876
24	JF Administrator Database Kependudukan	Dinas Catpil	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
25	JF Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Catpil	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
26	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	7	2.129.945
27	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	6	1.771.974
28	Jabatan Pelaksana	Dinas Catpil	Pelaksana	5	1.715.574
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Kepala Dinas PMD	Dinas PMD	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas	Dinas PMD	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas PMD	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	5	1.715.574
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas PMD	Struktural	9	3.307.423
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas PMD	Struktural	8	3.223.197
10	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	7	2.129.945
11	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	6	1.771.974
12	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	5	1.715.574
13	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa	Dinas PMD	Struktural	11	6.430.876
14	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Dinas PMD	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
15	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	7	2.129.945
16	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	6	1.771.974
17	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	5	1.715.574
18	Kepala Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa	Dinas PMD	Struktural	11	6.430.876
19	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Dinas PMD	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
20	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	7	2.129.945
21	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	6	1.771.974
22	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	5	1.715.574
23	Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman	Dinas PMD	Struktural	11	6.430.876
24	JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	Dinas PMD	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
25	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas PMD	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
26	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	7	2.129.945
27	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	6	1.771.974
28	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	5	1.715.574
29	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Dinas PMD	Struktural	11	6.430.876
30	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas PMD	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
31	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	7	2.129.945
32	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	6	1.771.974
33	Jabatan Pelaksana	Dinas PMD	Pelaksana	5	1.715.574
	DINAS PERHUBUNGAN				
1	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas	Struktural	14	17.824.199

		Perhubungan			
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	Struktural	12	7.738.523
3	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Perhubungan	Struktural	9	3.849.014
4	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Perhubungan	Struktural	8	3.273.040
5	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	6	1.774.519
7	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	5	1.719.820
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Perhubungan	Struktural	9	3.849.014
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Perhubungan	Struktural	8	3.273.040
10	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	7	2.129.945
11	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	6	1.774.519
12	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	5	1.719.820
13	Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan	Struktural	11	6.654.891
14	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Perhubungan	Fungsional Penyetaraan	9	3.849.014
15	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	7	2.129.945
16	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	6	1.774.519
17	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	5	1.719.820
18	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	Dinas Perhubungan	Struktural	9	3.849.014
19	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	Dinas Perhubungan	Struktural	8	3.273.040
20	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	7	2.129.945
21	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	6	1.774.519
22	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	5	1.719.820
23	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan	Struktural	9	3.849.014
24	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan	Struktural	8	3.273.040
25	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	7	2.129.945
26	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	6	1.774.519
27	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	5	1.719.820
28	Kepala Bidang Angkutan Darat dan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Struktural	11	6.654.891
29	Kepala Seksi Angkutan Darat	Dinas Perhubungan	Struktural	9	3.849.014
30	Kepala Seksi Angkutan Darat	Dinas Perhubungan	Struktural	8	3.273.040
31	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	7	2.129.945
32	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	6	1.774.519
33	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	5	1.719.820
34	Kepala Seksi Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Struktural	9	3.849.014

35	Kepala Seksi Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Struktural	8	3.273.040
36	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	7	2.129.945
37	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	6	1.774.519
38	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	5	1.719.820
39	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Perhubungan	Fungsional Penyetaraan	9	3.849.014
40	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	7	2.129.945
41	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	6	1.774.519
42	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	5	1.719.820
43	Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Sungai	Dinas Perhubungan	Struktural	11	6.654.891
44	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Sungai	Dinas Perhubungan	Struktural	9	3.849.014
45	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Sungai	Dinas Perhubungan	Struktural	8	3.273.040
46	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	7	2.129.945
47	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	6	1.774.519
48	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	5	1.719.820
49	Kepala Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran	Dinas Perhubungan	Struktural	9	3.849.014
50	Kepala Seksi Kepelabuhan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran	Dinas Perhubungan	Struktural	8	3.273.040
51	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	7	2.129.945
52	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	6	1.774.519
53	Jabatan Pelaksana	Dinas Perhubungan	Pelaksana	5	1.719.820
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Kepala Dinas Kominfo	Dinas Kominfo	Struktural	14	17.824.199
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kominfo	Struktural	12	7.738.523
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kominfo	Struktural	9	3.849.014
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kominfo	Struktural	8	3.273.040
5	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	6	1.774.519
7	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	5	1.715.574
8	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Dinas Kominfo	Struktural	9	3.849.014
9	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Dinas Kominfo	Struktural	8	3.273.040
10	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	7	2.129.945
11	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	6	1.774.519
12	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	5	1.715.574
13	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo	Struktural	11	6.654.891
14	JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Kominfo	Fungsional Penyetaraan	9	3.849.014
15	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	7	2.129.945
16	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	6	1.774.519
17	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	5	1.715.574
18	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi dan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo	Struktural	11	6.654.891
19	JF Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kominfo	Fungsional Penyetaraan	9	3.849.014

20	JF Manggala Informatika Ahli Muda	Dinas Kominfo	Fungsional Penyetaraan	9	3.849.014
21	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	7	2.129.945
22	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	6	1.774.519
23	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	5	1.715.574
24	Kepala Bidang Pengendalian Telekomunikasi dan Jasa Telekomunikasi	Dinas Kominfo	Struktural	11	6.654.891
25	Kepala Seksi Sandi dan Telekomunikasi	Dinas Kominfo	Struktural	9	3.849.014
26	Kepala Seksi Sandi dan Telekomunikasi	Dinas Kominfo	Struktural	8	3.273.040
27	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	7	2.129.945
28	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	6	1.774.519
29	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	5	1.715.574
30	JF Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kominfo	Fungsional Penyetaraan	9	3.849.014
31	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	7	2.129.945
32	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	6	1.774.519
33	Jabatan Pelaksana	Dinas Kominfo	Pelaksana	5	1.715.574
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU				
1	Kepala Dinas PMP2TSP	Dinas PMP2TSP	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas	Dinas PMP2TSP	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas PMP2TSP	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas PMP2TSP	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	5	1.715.574
8	JF Perencana Ahli Muda	Dinas PMP2TSP	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
9	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	7	2.129.945
10	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	6	1.771.974
11	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	5	1.715.574
12	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal	Dinas PMP2TSP	Struktural	11	6.430.876
13	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas PMP2TSP	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
14	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	7	2.129.945
15	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	6	1.771.974
16	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	5	1.715.574
17	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas PMP2TSP	Struktural	11	6.430.876
18	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas PMP2TSP	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
19	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	7	2.129.945
20	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	6	1.771.974
21	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	5	1.715.574
22	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, Informasi dan Pelaporan	Dinas PMP2TSP	Struktural	11	6.430.876
23	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	Dinas PMP2TSP	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
24	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	7	2.129.945
25	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	6	1.771.974
26	Jabatan Pelaksana	Dinas PMP2TSP	Pelaksana	5	1.715.574
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
1	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Dispota	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas	Dispota	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum	Dispota	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum	Dispota	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	5	1.715.574
8	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Dispota	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423

9	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	7	2.129.945
10	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	6	1.771.974
11	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	5	1.715.574
12	Kepala Bidang Program, Sarana dan Prasarana	Dispota	Struktural	11	6.430.876
13	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dispota	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
14	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	5	1.715.574
15	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	6	1.771.974
16	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	7	2.129.945
17	Kepala Bidang Bina Kepemudaan	Dispota	Struktural	11	6.430.876
18	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dispota	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
19	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	5	1.715.574
20	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	6	1.771.974
21	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	7	2.129.945
22	Kepala Bidang Bina Keolahragaan	Dispota	Struktural	11	6.430.876
23	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dispota	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
24	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	5	1.715.574
25	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	6	1.771.974
26	Jabatan Pelaksana	Dispota	Pelaksana	7	2.129.945
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
1	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Pariwisata	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Pariwisata	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dinas Pariwisata	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas Pariwisata	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dinas Pariwisata	Pelaksana	5	1.715.574
8	JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Dinas Pariwisata	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
9	Jabatan Pelaksana	Dinas Pariwisata	Pelaksana	7	2.129.945
10	Jabatan Pelaksana	Dinas Pariwisata	Pelaksana	6	1.771.974
11	Jabatan Pelaksana	Dinas Pariwisata	Pelaksana	5	1.715.574
12	Kepala Bidang Wisata	Dinas Pariwisata	Struktural	11	6.430.876
13	JF Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Dinas Pariwisata	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
14	Jabatan Pelaksana	Dinas Pariwisata	Pelaksana	7	2.129.945
15	Jabatan Pelaksana	Dinas Pariwisata	Pelaksana	6	1.771.974
16	Jabatan Pelaksana	Dinas Pariwisata	Pelaksana	5	1.715.574
17	Kepala Bidang Seni dan Budaya	Dinas Pariwisata	Struktural	11	6.430.876
18	JF Pamong Budaya Ahli Muda	Dinas Pariwisata	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
19	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Pariwisata	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
20	Jabatan Pelaksana	Dinas Pariwisata	Pelaksana	7	2.129.945
21	Jabatan Pelaksana	Dinas Pariwisata	Pelaksana	6	1.771.974
22	Jabatan Pelaksana	Dinas Pariwisata	Pelaksana	5	1.715.574
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
1	Kepala Dinas Kearsipan	Dinas Kearsipan	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kearsipan	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Kearsipan	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Kearsipan	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dinas Kearsipan	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas Kearsipan	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dinas Kearsipan	Pelaksana	5	1.715.574
8	JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Dinas Kearsipan	Struktural	9	3.307.423
9	Jabatan Pelaksana	Dinas Kearsipan	Pelaksana	7	2.129.945
10	Jabatan Pelaksana	Dinas Kearsipan	Pelaksana	6	1.771.974
11	Jabatan Pelaksana	Dinas Kearsipan	Pelaksana	5	1.715.574
12	Kepala Bidang Kearsipan	Dinas Kearsipan	Struktural	11	6.430.876

13	JF Arsiparis Ahli Muda	Dinas Kearsipan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
14	Jabatan Pelaksana	Dinas Kearsipan	Pelaksana	7	2.129.945
15	Jabatan Pelaksana	Dinas Kearsipan	Pelaksana	6	1.771.974
16	Jabatan Pelaksana	Dinas Kearsipan	Pelaksana	5	1.715.574
17	Kepala Bidang Perpustakaan	Dinas Kearsipan	Struktural	11	6.430.876
18	JF Pustakawan Ahli Muda	Dinas Kearsipan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
19	Jabatan Pelaksana	Dinas Kearsipan	Pelaksana	7	2.129.945
20	Jabatan Pelaksana	Dinas Kearsipan	Pelaksana	6	1.771.974
21	Jabatan Pelaksana	Dinas Kearsipan	Pelaksana	5	1.715.574
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				
1	Kepala Dinas Perdagperin	Dinas Perdagperin	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perdagperin	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perdagperin	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perdagperin	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	5	1.715.574
8	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	Dinas Perdagperin	Struktural	9	3.307.423
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	Dinas Perdagperin	Struktural	8	3.223.197
10	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	7	2.129.945
11	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	6	1.771.974
12	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	5	1.715.574
13	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perdagperin	Struktural	11	6.430.876
14	JF Analis Perdagangan Ahli Muda	Dinas Perdagperin	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
15	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	7	2.129.945
16	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	6	1.771.974
17	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	5	1.715.574
18	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	3	1.518.041
19	Kepala Bidang Perindustrian	Dinas Perdagperin	Struktural	11	6.430.876
20	JF Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	Dinas Perdagperin	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
21	JF Penyuluh Perindustrian Ahli Muda	Dinas Perdagperin	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
22	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	7	2.129.945
23	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	6	1.771.974
24	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	5	1.715.574
25	Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga Ahli Muda	Dinas Perdagperin	Struktural	11	6.430.876
26	JF Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda	Dinas Perdagperin	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423

27	JF Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda	Dinas Perdagperin	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
28	JF Pengawas Perdagangan Ahli Muda	Dinas Perdagperin	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
29	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	7	2.129.945
30	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	6	1.771.974
31	Jabatan Pelaksana	Dinas Perdagperin	Pelaksana	5	1.715.574
UPT METROLOGI					
1	Kepala UPT Metrologi Legal	UPT Metrologi	Struktural	9	3.472.794
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	UPT Metrologi	Struktural	8	2.751.347
3	Jabatan Pelaksana	UPT Metrologi	Pelaksana	7	2.129.945
4	Jabatan Pelaksana	UPT Metrologi	Pelaksana	6	1.771.974
5	Jabatan Pelaksana	UPT Metrologi	Pelaksana	5	1.715.574
6	JF Penera Muda	UPT Metrologi	Fungsional	9	2.563.253
7	JF Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama	UPT Metrologi	Fungsional	8	2.226.332
8	JF Pengamat Tera Terampil	UPT Metrologi	Fungsional	6	1.794.887
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan	Struktural	14	17.430.294
2	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan	Struktural	12	7.448.770
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Aset	Dinas Kelautan	Struktural	9	3.307.423
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Aset	Dinas Kelautan	Struktural	8	3.223.197
5	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	6	1.771.974
7	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	5	1.715.574
8	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Dinas Kelautan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
9	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	7	2.129.945
10	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	6	1.771.974
11	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	5	1.715.574
12	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan Kecil	Dinas Kelautan	Struktural	11	6.430.876
13	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
14	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	7	2.129.945
15	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	6	1.771.974
16	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	5	1.715.574
17	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Bina Usaha	Dinas Kelautan	Struktural	11	6.430.876
18	JF Analis Akuakultur Ahli Muda	Dinas Kelautan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
19	JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	Dinas Kelautan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
20	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	7	2.129.945
21	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	6	1.771.974
22	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	5	1.715.574
23	Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan	Struktural	11	6.430.876
24	JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
25	JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan	Fungsional Penyetaraan	9	3.307.423
26	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	7	2.129.945
27	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	6	1.771.974
28	Jabatan Pelaksana	Dinas Kelautan	Pelaksana	5	1.715.574
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
1	Kepala Badan	Bappeda	Struktural	14	19.143.781
2	Sekretaris Badan	Bappeda	Struktural	12	9.611.316
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bappeda	Struktural	9	4.609.721

4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bappeda	Struktural	8	4.213.416
5	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	7	2.607.498
6	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	6	1.820.346
7	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	5	1.741.053
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Bappeda	Struktural	9	4.609.721
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	Bappeda	Struktural	8	4.213.416
10	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	7	2.607.498
11	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	6	1.820.346
12	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	5	1.741.053
13	Kepala Bidang Ekonomi	Bappeda	Struktural	11	8.250.317
14	JF Perencana Ahli Muda	Bappeda	Fungsional Penyetaraan	9	4.609.721
15	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	7	2.607.498
16	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	6	1.820.346
17	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	5	1.741.053
18	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana	Bappeda	Struktural	11	8.250.317
19	JF Perencana Ahli Muda	Bappeda	Fungsional Penyetaraan	9	4.609.721
20	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	7	2.607.498
21	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	6	1.820.346
22	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	5	1.741.053
23	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan	Bappeda	Struktural	11	8.250.317
24	JF Perencana Ahli Muda	Bappeda	Fungsional Penyetaraan	9	4.609.721
25	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	7	2.607.498
26	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	6	1.820.346
27	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	5	1.741.053
28	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik	Bappeda	Struktural	11	8.250.317
29	JF Peneliti Ahli Muda	Bappeda	Fungsional Penyetaraan	9	4.609.721
30	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	7	2.607.498
31	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	6	1.820.346
32	Jabatan Pelaksana	Bappeda	Pelaksana	5	1.741.053
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
1	Kepala Badan	BPKAD	Struktural	14	19.143.781
2	Sekretaris Badan	BPKAD	Struktural	12	9.611.316
3	Kepala Sub Bagian Umum	BPKAD	Struktural	9	4.609.721
4	Kepala Sub Bagian Umum	BPKAD	Struktural	8	4.213.416
5	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	7	2.607.498
6	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	6	1.820.346
7	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	5	1.741.053
8	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	BPKAD	Fungsional Penyetaraan	9	4.609.721
9	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	7	2.607.498
10	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	6	1.820.346
11	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	5	1.741.053
12	Kepala Bidang Anggaran	BPKAD	Struktural	11	8.250.317
13	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	BPKAD	Struktural	9	4.609.721
14	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	BPKAD	Struktural	8	4.213.416
15	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	7	2.607.498
16	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	6	1.820.346
17	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	5	1.741.053
18	Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran	BPKAD	Struktural	9	4.609.721
19	Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran	BPKAD	Struktural	8	4.213.416
20	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	7	2.607.498
21	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	6	1.820.346
22	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	5	1.741.053
23	Kepala Bidang Perbendaharaan	BPKAD	Struktural	11	8.250.317

24	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	BPKAD	Struktural	9	4.609.721
25	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	BPKAD	Struktural	8	4.213.416
26	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	7	2.607.498
27	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	6	1.820.346
28	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	5	1.741.053
29	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	BPKAD	Struktural	9	4.609.721
30	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	BPKAD	Struktural	8	4.213.416
31	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	7	2.607.498
32	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	6	1.820.346
33	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	5	1.741.053
34	Kepala Bidang Verifikasi dan Pembukuan	BPKAD	Struktural	11	8.250.317
35	Kepala Sub Bidang Verifikasi	BPKAD	Struktural	9	4.609.721
36	Kepala Sub Bidang Verifikasi	BPKAD	Struktural	8	4.213.416
37	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	7	2.607.498
38	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	6	1.820.346
39	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	5	1.741.053
40	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	BPKAD	Struktural	9	4.609.721
41	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	BPKAD	Struktural	8	4.213.416
42	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	7	2.607.498
43	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	6	1.820.346
44	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	5	1.741.053
45	Kepala Bidang Asset Daerah	BPKAD	Struktural	11	8.250.317
46	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Struktural	9	4.609.721
47	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Struktural	8	4.213.416
48	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	7	2.607.498
49	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	6	1.820.346
50	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	5	1.741.053
51	Kepala Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Struktural	9	4.609.721
52	Kepala Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Struktural	8	4.213.416
53	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	7	2.607.498
54	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	6	1.820.346
55	Jabatan Pelaksana	BPKAD	Pelaksana	5	1.741.053
	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
1	Kepala Badan	Bapenda	Struktural	14	18.316.581
2	Sekretaris Badan	Bapenda	Struktural	12	8.833.930
3	Kepala Sub Bagian Umum	Bapenda	Struktural	9	4.568.378
4	Kepala Sub Bagian Umum	Bapenda	Struktural	8	4.186.833
5	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	7	2.343.818
6	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	6	1.794.887
7	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	5	1.736.806
8	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Bapenda	Fungsional Penyetaraan	9	4.568.378
9	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	7	2.343.818
10	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	6	1.794.887
11	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	5	1.736.806
12	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	Bapenda	Struktural	11	7.376.111
13	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian	Bapenda	Struktural	9	4.568.378
14	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian	Bapenda	Struktural	8	4.186.833
15	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	7	2.343.818

16	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	6	1.794.887
17	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	5	1.736.806
18	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan	Bapenda	Struktural	9	4.568.378
19	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan	Bapenda	Struktural	8	4.186.833
20	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	7	2.343.818
21	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	6	1.794.887
22	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	5	1.736.806
23	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan	Bapenda	Struktural	11	7.376.111
24	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi	Bapenda	Struktural	9	4.568.378
25	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi	Bapenda	Struktural	8	4.186.833
26	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	7	2.343.818
27	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	6	1.794.887
28	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	5	1.736.806
29	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan	Bapenda	Struktural	9	4.568.378
30	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan	Bapenda	Struktural	8	4.186.833
31	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	7	2.343.818
32	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	6	1.794.887
33	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	5	1.736.806
34	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan	Bapenda	Struktural	11	7.376.111
35	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional	Bapenda	Struktural	9	4.568.378
36	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional	Bapenda	Struktural	8	4.186.833
37	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	7	2.343.818
38	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	6	1.794.887
39	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	5	1.736.806
40	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Bapenda	Struktural	9	4.568.378
41	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Bapenda	Struktural	8	4.186.833
42	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	7	2.343.818
43	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	6	1.794.887
44	Jabatan Pelaksana	Bapenda	Pelaksana	5	1.736.806
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH					
1	Kepala Badan	BKD	Struktural	14	19.143.781
2	Sekretaris Badan	BKD	Struktural	12	9.611.316
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	BKD	Struktural	9	4.609.721
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	BKD	Struktural	8	4.213.416
5	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	7	2.607.498
6	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	6	1.820.346
7	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	5	1.741.053
8	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	BKD	Struktural	9	4.609.721
9	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	BKD	Struktural	8	4.213.416
10	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	7	2.607.498
11	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	6	1.820.346
12	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	5	1.741.053
13	Kepala Bidang Pengembangan, Pengadaan dan Informasi	BKD	Struktural	11	8.250.317
14	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	BKD	Fungsional Penyetaraan	9	4.609.721
15	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	7	2.607.498
16	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	6	1.820.346
17	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	5	1.741.053
18	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	BKD	Struktural	11	8.250.317

19	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	BKD	Fungsional Penyetaraan	9	4.609.721
20	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	7	2.607.498
21	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	6	1.820.346
22	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	5	1.741.053
23	Kepala Bidang Penilaian Kinerja, Penghargaan dan Pemberhentian	BKD	Struktural	11	8.250.317
24	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	BKD	Fungsional Penyetaraan	9	4.609.721
25	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	7	2.607.498
26	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	6	1.820.346
27	Jabatan Pelaksana	BKD	Pelaksana	5	1.741.053
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1	Kepala Pelaksana BPBD	BPBD	Struktural	14	17.824.199
2	Sekretaris Badan	BPBD	Struktural	12	7.738.523
3	Kepala Sub Bagian Umum	BPBD	Struktural	9	3.849.014
4	Kepala Sub Bagian Umum	BPBD	Struktural	8	3.273.040
5	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	7	2.129.945
6	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	6	1.774.519
7	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	5	1.719.820
8	Kepala Sub Bagian Program	BPBD	Struktural	9	3.849.014
9	Kepala Sub Bagian Program	BPBD	Struktural	8	3.273.040
10	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	7	2.129.945
11	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	6	1.774.519
12	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	5	1.719.820
13	Kepala Sub Bagian Keuangan	BPBD	Struktural	9	3.849.014
14	Kepala Sub Bagian Keuangan	BPBD	Struktural	8	3.273.040
15	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	7	2.129.945
16	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	6	1.774.519
17	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	5	1.719.820
18	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD	Struktural	11	6.654.891
19	Kepala Sub Bidang Pencegahan	BPBD	Struktural	9	3.849.014
20	Kepala Sub Bidang Pencegahan	BPBD	Struktural	8	3.273.040
21	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	7	2.129.945
22	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	6	1.774.519
23	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	5	1.719.820
24	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan	BPBD	Struktural	9	3.849.014
25	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan	BPBD	Struktural	8	3.273.040
26	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	7	2.129.945
27	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	6	1.774.519
28	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	5	1.719.820
29	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	BPBD	Struktural	11	6.654.891
30	Kepala Sub Bidang Kedaruratan	BPBD	Struktural	9	3.849.014
31	Kepala Sub Bidang Kedaruratan	BPBD	Struktural	8	3.273.040
32	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	7	2.129.945
33	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	6	1.774.519
34	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	5	1.719.820
35	Kepala Sub Bidang Logistik	BPBD	Struktural	9	3.849.014
36	Kepala Sub Bidang Logistik	BPBD	Struktural	8	3.273.040
37	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	7	2.129.945
38	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	6	1.774.519
39	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	5	1.719.820
40	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD	Struktural	11	6.654.891
41	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi	BPBD	Struktural	9	3.849.014
42	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi	BPBD	Struktural	8	3.273.040
43	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	7	2.129.945
44	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	6	1.774.519
45	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	5	1.719.820
46	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi	BPBD	Struktural	9	3.849.014
47	Kepala Sub Bidang Rekonstruksi	BPBD	Struktural	8	3.273.040
48	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	7	2.129.945
49	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	6	1.774.519

50	Jabatan Pelaksana	BPBD	Pelaksana	5	1.719.820
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Kepala Kantor	Kantor Kesbangpol	Struktural	12	12.720.859
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kantor Kesbangpol	Struktural	9	3.303.289
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kantor Kesbangpol	Struktural	8	3.223.197
4	Jabatan Pelaksana	Kantor Kesbangpol	Pelaksana	7	2.129.945
5	Jabatan Pelaksana	Kantor Kesbangpol	Pelaksana	6	1.771.974
6	Jabatan Pelaksana	Kantor Kesbangpol	Pelaksana	5	1.715.574
7	Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional	Kantor Kesbangpol	Struktural	9	3.303.289
8	Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional	Kantor Kesbangpol	Struktural	8	3.223.197
9	Jabatan Pelaksana	Kantor Kesbangpol	Pelaksana	7	2.129.945
10	Jabatan Pelaksana	Kantor Kesbangpol	Pelaksana	6	1.771.974
11	Jabatan Pelaksana	Kantor Kesbangpol	Pelaksana	5	1.715.574
12	Kepala Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Kantor Kesbangpol	Struktural	9	3.303.289
13	Kepala Seksi Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Kantor Kesbangpol	Struktural	8	3.223.197
14	Jabatan Pelaksana	Kantor Kesbangpol	Pelaksana	7	2.129.945
15	Jabatan Pelaksana	Kantor Kesbangpol	Pelaksana	6	1.771.974
16	Jabatan Pelaksana	Kantor Kesbangpol	Pelaksana	5	1.715.574
17	Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik	Kantor Kesbangpol	Struktural	9	3.303.289
18	Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik	Kantor Kesbangpol	Struktural	8	3.223.197
19	Jabatan Pelaksana	Kantor Kesbangpol	Pelaksana	7	2.129.945
20	Jabatan Pelaksana	Kantor Kesbangpol	Pelaksana	6	1.771.974
21	Jabatan Pelaksana	Kantor Kesbangpol	Pelaksana	5	1.715.574
	KECAMATAN				
1	Camat	Kecamatan	Struktural	12	11.420.505
2	Sekretaris Camat	Kecamatan	Struktural	11	6.775.095
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kecamatan	Struktural	8	3.130.156
4	Jabatan Pelaksana	Kecamatan	Pelaksana	7	2.129.945
5	Jabatan Pelaksana	Kecamatan	Pelaksana	6	1.771.974
6	Jabatan Pelaksana	Kecamatan	Pelaksana	5	1.715.574
7	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Kecamatan	Struktural	8	3.233.165
8	Jabatan Pelaksana	Kecamatan	Pelaksana	7	2.129.945
9	Jabatan Pelaksana	Kecamatan	Pelaksana	6	1.771.974
10	Jabatan Pelaksana	Kecamatan	Pelaksana	5	1.715.574
11	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Kecamatan	Struktural	8	3.233.165
12	Jabatan Pelaksana	Kecamatan	Pelaksana	7	2.129.945
13	Jabatan Pelaksana	Kecamatan	Pelaksana	6	1.771.974
14	Jabatan Pelaksana	Kecamatan	Pelaksana	5	1.715.574
15	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan	Struktural	8	3.233.165
16	Jabatan Pelaksana	Kecamatan	Pelaksana	7	2.129.945
17	Jabatan Pelaksana	Kecamatan	Pelaksana	6	1.771.974
18	Jabatan Pelaksana	Kecamatan	Pelaksana	5	1.715.574

	KELURAHAN				
1	Lurah	Kelurahan	Struktural	9	3.431.452
2	Sekretaris Lurah	Kelurahan	Struktural	8	2.890.908
3	Jabatan Pelaksana	Kelurahan	Pelaksana	7	2.129.945
4	Jabatan Pelaksana	Kelurahan	Pelaksana	6	1.771.974
5	Jabatan Pelaksana	Kelurahan	Pelaksana	5	1.715.574
6	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	Kelurahan	Struktural	8	2.791.222
7	Jabatan Pelaksana	Kelurahan	Pelaksana	7	2.129.945
8	Jabatan Pelaksana	Kelurahan	Pelaksana	6	1.771.974
9	Jabatan Pelaksana	Kelurahan	Pelaksana	5	1.715.574
10	Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial	Kelurahan	Struktural	8	2.791.222
11	Jabatan Pelaksana	Kelurahan	Pelaksana	7	2.129.945
12	Jabatan Pelaksana	Kelurahan	Pelaksana	6	1.771.974
13	Jabatan Pelaksana	Kelurahan	Pelaksana	5	1.715.574
14	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan	Struktural	8	2.791.222
15	Jabatan Pelaksana	Kelurahan	Pelaksana	7	2.129.945
16	Jabatan Pelaksana	Kelurahan	Pelaksana	6	1.771.974
17	Jabatan Pelaksana	Kelurahan	Pelaksana	5	1.715.574

Pt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I

NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran II Peraturan Bupati Langkat
Nomor : 7 Tahun 2022
Tanggal : 14-4-2022
Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat

PERSENTASE PENGURANGAN TPP
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA
DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. ≤ 30 menit	0 % (apabila mengganti waktu keterlambatan sesuai dengan durasi keterlambatan)
TL 2	1 menit s.d. ≤ 30 menit	0,5 % (apabila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TL 3	31 menit s.d. ≤ 60 menit	1 %
TL 4	61 menit s.d. ≤ 90 menit	1,25%
TL 5	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran III Peraturan Bupati Langkat

Nomor : 7 Tahun 2022

Tanggal : 14-4-2022

Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat

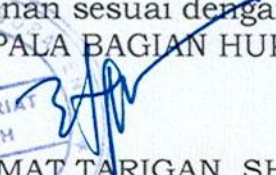
PERSENTASE PENGURANGAN TPP
BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTU
DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. \leq 30 menit	0 % (apabila memperoleh izin pulang sebelum waktu)
PSW 2	1 menit s.d. \leq 30 menit	0,5 % (apabila tidak memperoleh izin pulang sebelum waktu)
PSW 3	31 menit s.d. \leq 60 menit	1 % (apabila tidak memperoleh izin pulang sebelum waktu)
PSW 4	61 menit s.d. \leq 90 menit	1,25 %
PSW 5	\geq 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19730803 200212 1 005



Lampiran IV Peraturan Bupati Langkat
 Nomor : 7 Tahun 2022
 Tanggal : 14-4-2022
 Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Langkat

DAFTAR HADIR
 SEKRETARIAT/BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN/KECAMATAN/KELURAHAN

HARI/TANGGAL :

No	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	MASUK KERJA		PULANG KERJA		KET
				JAM	PARAF	JAM	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA.....

(.....)
 NIP.

Plt. BUPATI LANGKAT
 WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, SH
 PEMBINA TK.I

NIP. 19730803 200212 1 005



Lampiran V Peraturan Bupati Langkat
 Nomor : 7 Tahun 2022
 Tanggal : 4-4-2022
 Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Langkat

BERITA ACARA IZIN TIDAK MASUK KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

pada hari ini tanggal bulan tahun
 pukul PNS sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat :

menyampaikan permohonan melalui (sms/wa/telepon dan sejenisnya),
 untuk mengajukan izin tidak masuk kerja dengan alasan yang sah dan
 telah disetujui oleh atasan langsungnya, pada :

Hari :
 Tanggal :
 Lama :..... (hari kerja)
 Keperluan :
 Alamat selama izin :

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan
 sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengelola Kepegawaian,

(.....)
 NIP.

Plt. BUPATI LANGKAT
 WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
 PEMBINA TK.I

NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran VI Peraturan Bupati Langkat
 Nomor : 7 Tahun 2022
 Tanggal : 14-4-2022
 Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Langkat

BERITA ACARA IZIN PULANG SEBELUM WAKTU

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

pada hari ini tanggal bulan tahun
 pukul PNS sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat :
 Rekam kehadiran :
 masuk kerja pukul

menyampaikan permohonan melalui (sms/wa/telepon dan sejenisnya),
 untuk mengajukan izin pulang sebelum waktu dengan alasan yang sah
 dan telah disetujui oleh atasan langsungnya, pada :

Pukul :
 Keperluan :
 Alamat selama izin :

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan
 sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengelola Kepegawaian,

(.....)
 NIP.

Plt. BUPATI LANGKAT
 WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
 PEMBINA TK.I

NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran VII Peraturan Bupati Langkat
Nomor : 7 Tahun 2022
Tanggal : 14-4-2022
Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat

LAPORAN KINERJA PEGAWAI
BULAN TAHUN

NAMA		:		NIP	:	
JABATAN		:		UNIT KERJA	:	
NO	URAIAN KEGIATAN			VOLUME		KETERANGAN

Mengetahui,

Stabat,
Yang membuat laporan,

(Atasan pegawai yang bersangkutan)

(Pegawai yang bersangkutan)

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19730803 200212 1 005

Lampiran VIII Peraturan Bupati Langkat

Nomor : 7 Tahun 2022

Tanggal : 14-4-2022

Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat

REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP ATAS DASAR DISIPLIN KERJA
SEKRETARIAT/BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN/KECAMATAN/KELURAHAN

BULAN :
KODE REKENING :

No	NAMA	NIP	NPWP	GOL.	JABATAN	DISIPLIN KERJA			PPh Pasal 21 (Final)		JUMLAH DITERIMA (Rp.)	KET
						BESARAN TPP	TPP DITERIMA (%)	JUMLAH (Rp.)	15%	5%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												

Mengetahui
KEPALA

(.....)
NIP.

Stabat,
BENDAHARA PENGELUARAN
Perangkat Daerah

(.....)
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I

NIP. 19730803 200212 1 005

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI,
ttd
SYAH AFANDIN



Lampiran IX Peraturan Bupati Langkat
 Nomor : 7 Tahun 2022
 Tanggal : 14-4-2022
 Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Langkat

REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP ATAS DASAR PRODUKTIVITAS KERJA
 SEKRETARIAT/BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN/KECAMATAN/KELURAHAN

BULAN :
 KODE REKENING :

No	NAMA	NIP	NPWP	GOL.	JABATAN	PRODUKTIVITAS KERJA			PPh Pasal 21 (Final)		JUMLAH DITERIMA (Rp.)	KET
						BESARAN TPP	TPP DITERIMA (%)	JUMLAH (Rp.)	15%	5%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												

Mengetahui
 KEPALA

(.....)
 NIP.

Stabat,
 BENDAHARA PENGELUARAN
 Perangkat Daerah

(.....)
 NIP.

Plt. BUPATI LANGKAT
 WAKIL BUPATI,
 ttd
 SYAH AFANDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, SH
 PEMBINA TK.I
 NIP. 19730803 200212 1 005



Lampiran X Peraturan Bupati Langkat
 Nomor : 7 Tahun 2022
 Tanggal : 14-4-2022
 Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Langkat

DAFTAR PERHITUNGAN AKHIR TPP ATAS DASAR DISIPLIN KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA
 SEKRETARIAT/BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN/KECAMATAN/KELURAHAN

BULAN :
 KODE REKENING :

No	NAMA	NIP	NPWP	GOL.	JABATAN	DISIPLIN KERJA (Rp)	PRODUKTIVITAS KERJA (Rp)	JUMLAH TPP (Rp)	PPh Pasal 21 (Final)		JUMLAH DITERIMA (Rp.)	TANDA TANGAN
									15%	5%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												

Mengetahui
 KEPALA

(.....)
 NIP.

Stabat,
 BENDAHARA PENGELUARAN
 Perangkat Daerah

(.....)
 NIP.

Plt. BUPATI LANGKAT
 WAKIL BUPATI,
 ttd
 SYAH AFANDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, SH
 PEMBINA TK.I
 NIP. 19730803 200212 1 005



Lampiran XI Peraturan Bupati Langkat
Nomor : 7 Tahun 2022
Tanggal : 14 - 4 - 2022
Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan SPM No. tanggal tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bulan.....yang kami ajukan sebesar Rp. (terbilang.....) kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Seluruh jumlah uang tersebut akan digunakan untuk keperluan kegiatan seperti tersebut di atas dengan sebenar-benarnya.
2. Seluruh jumlah uang tersebut tidak akan kami gunakan untuk keperluan lain selain kegiatan tersebut di atas.
3. Bila terjadi penyimpangan dari kegiatan tersebut di atas kami akan bertanggungjawab.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS dan Penerbitan SP2D.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Stabat,

Kepala Unit Kerja

NIP.

Plt. BUPATI LANGKAT
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I

NIP. 19730803 200212 1 005

